

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT

Nadya Balqis¹, Zuhrizal Fadhly², Maulyanda³

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Aceh Barat, Indonesia

³Politeknik Pos Indonesia, Jl. Sariasih No. 54, Bandung, Indonesia

E-mail: nadya.balqis07@gmail.com; zuhrizalfadhlyfisip@gmail.com; maulyanda@poltekpos.ac.id.

ABSTRAK. Untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat, Kemendagri merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi yang berguna untuk mencapai suatu keberhasilan koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. SIPD di implementasikan juga bertujuan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, penyelenggaraan pengelolaan perencanaan serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data. Implementasi SIPD ini juga untuk menjalankan kebijakan dari setiap program kegiatan Pemkab Aceh Barat terkhususnya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kasus dalam riset ini merupakan Implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat. Objek yang diteliti merupakan implementasi dari aplikasi SIPD. Model analisis yang digunakan riset penelitian yakni analisis Deskriptif Kualitatif, memakai teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat dimana terdapat kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari analisis Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan Diklat Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi, SIPD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Aceh Barat

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) APPLICATION IN THE TRANSMIGRATION AND MANPOWER DEPARTMENT WEST ACEH DISTRICT

ABSTRACT. To create accurate information, the Ministry of Home Affairs designed an application for the Regional Government Information System (SIPD) as a useful application to achieve a successful coordination between the central government and regional governments. The implementation of SIPD is also aimed at the realization of good government, implementation of data technology-based regional planning and budgeting management. The implementation of SIPD is also to carry out the policies of each program of the West Aceh Regency Government activities, especially the Transmigration and Manpower Office. The case in this research is the implementation of SIPD at the Department of Transmigration and Manpower Kab. West Aceh. The object under study is the implementation of the SIPD application. The analytical model used in this research is descriptive qualitative analysis, using Edward III's theory of Communication, Human Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This theory is used to see where there are obstacles in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) application. The results of the analysis of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) application at the Transmigration and Manpower Office of the Regency. Aceh Barat from the four indicators of Edward III's theory covering the dimensions of Communication, Human Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, there are still obstacles in the communication dimension; resource; and disposition. significantly, and there are obstacles in other dimensions, namely the time in using the SIPD application. Thus, Special Education and Training is needed to provide more understanding for SIPD application users, especially users in related agencies.

Keywords: implementation, application, SIPD, Transmigration and Manpower Office, West Aceh

PENDAHULUAN

Sistem data di masa globalisasi dikala ini tumbuh sangat pesat dengan Teknologi Komputer yang terus menjadi mutakhir dalam waktu yang relatif pendek. Perihal ini dibuktikan dengan informasi yang dikeluarkan oleh *Gartner Market Databook* (Databook, 2018) yang menyatakan jika ditaksir pengeluaran investasi Teknologi Data global pada tahun 2022 hendak menggapai \$4, 2 triliun. Ini menampilkan kalau baik Teknologi Data ataupun Sistem Data telah menjadi perihal yang sangat berarti di tiap bidang kerja ataupun di tiap elemen warga. Akibat perubahan teknologi yang semakin menggerus dunia, ini menjadi urgensi dalam mempertahankan daya saing (Wartini & Yasa, 2016).

Dalam perkembangan zaman, didalam organisasi suatu sistem informasi sangat dibutuhkan dan sangat pesat terjadi perkembangan (Ruhana, 2017). Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sangat erat kaitannya dengan *e-government* (Rahmadanita et al., 2018). Dimana SIPD juga merupakan aplikasi yang di implementasikan oleh pemerintah guna mewujudkan kebijakan *E-government*. Dalam perekonomiannya, Indonesia memiliki 3 zona meliputi zona publik, swasta dan koperasi. Dikarenakan entitas dari zona publik sangat besar dan sangat berdominasi, sangat sulit melepaskan zona ini sendiri (Jogiyanto, 2007). Bagi (Abdul Halim (2008) pemerintah beserta unit-unit yang dikelola berkaitan dengan pelayanan masyarakat meliputi kesehatan, pembelajaran, beserta bidang sumber dayanya merupakan makna dari zona publik.

Kedudukan serta kinerja dari zona publik sangat berpengaruh dalam majunya suatu bangsa. Semenjak diberlakukannya UU mengenai Otonomi Daerah di Indonesia dimana pusat diberi wewenang guna mengendalikan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan data Pemerintahan Daerah yang meliputi Pembangunan serta Keuangan Daerah. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 391 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dulunya terdapat dalam UU No 9 Tahun 2015. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri, 2019). Hal tersebut disebabkan karenadianggap belum mampu dalam mengendalikan data pemerintahan daerah dalam satu sistem yang saling berkaitan.

Dalam rangka mewujudkan informasi akurat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam perencanaan serta penganggaran, penggunaan teknologi merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Semenjak diterapkan Permendagri No 70 Tahun 2019, percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali guna mencapai tujuan yang telah di harapkan (Ekaputra, 2021). Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses Perencanaan serta Anggaran, pemerintahan daerah memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi data guna bisa

melaksanakan serta menyalurkan data Perencanaan serta Anggaran secara transparansi terhadap masyarakat. Sehingga proses ini bisa sejalan dengan prinsip *good government*. SIPD adalah sebuah bentuk sistem yang diciptakan sebagai wujud teknologi yang dimanfaatkan dan di realisasikan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan *good government* Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mempraktikkan dan mengimplementasikan Sistem Data Pemerintahan Daerah (SIPD) semenjak tahun 2020.

Menurut Nasution & Nurwani (2021) Menampung sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan lainnya termasuk didalamnya sistem pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah merupakan fungsi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut Sudaning & Seputra (2019) ada 2 hal penting yang disampaikan terkait SIPD, yaitu : 1) dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sangat penting mengelola tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara baik dan 2) dalam perencanaan pembangunan daerah, SIPD memiliki fungsi yang sangat kritis guna memperoleh hasil: a) terhadap persoalan daerah, pemerintah lebih responsif; b) dalam perencanaan daerah diperlukan peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif; serta c) dapat mendorong

transparansi serta keterbukaan bagi publik di setiap daerah.

Menurut Dione & Faradina (2020) Di kota Bengkulu, implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Hanya saja, masih kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD dan juga belum maksimalnya sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan para pelaksana SIPD dalam pengisian data.

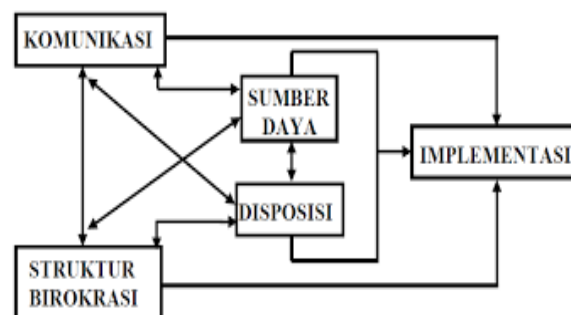
Mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik, pemerintah harus menciptakan perubahan-perubahan terhadap sistem yang ada (Azzindani & Irwan, 2020). Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kewajiban yang memang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Aceh Barat agar dapat sejalan dengan pengimplementasian *good governance*. Dimana guna mencapai *good governance*, pemerintah mengeluarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 terkait pengimplementasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini sudah diterapkan di setiap SKPD yang ada di Kabupaten, khususnya Kabupaten Aceh Barat.

Guna mendorong terwujudnya sistem data dan informasi, kebijakan ini ditujukan guna memberikan fasilitas bagi pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan pengelolaan sistem informasi daerah yang efektif, valid, serta akurat. Guna mendorong sistem di pusat serta daerah kearah yang lebih baik, kebijakan ini sangat diharapkan untuk

pengambilan keputusan (Wurara et al., 2020).

Mempermudah serta mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat ialah tujuan dari penerapan aplikasi berbasis web ini. Pada kenyataannya, fenomena yang terjadi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terkait pengimplementasian SIPD, masih banyak kendala yang dialami oleh pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kerjasama serta partisipasi setiap instansi serta pegawai yang terlibat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan ini.

Dikarenakan observasi awal yang didapat peneliti, bagi pelaksana aplikasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menerapkan aplikasi ini tidaklah gampang. Salah satu kendala yaitu terjadinya kendala didalam penginputan data. Dimana *step by step* penginputan data dilakukan secara *online*. Observasi awal yang peneliti dapatkan juga menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merasa belum siap akan penggunaan aplikasi yang berbasis web ini. Oleh sebab itu, peneliti menduga permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dalam mengelola aplikasi SIPD.



Sumber: diakses google (2021)

Gambar 1. Model Teori Implementasi Edward III

Berdasarkan kajian yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti menggunakan teori Edward III sebagai Guide Analysis dalam penelitian ini. Edward III mengajukan 2 pertanyaan yang berguna untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

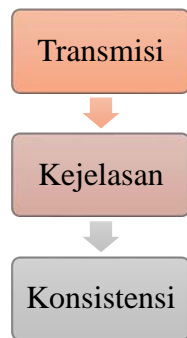
1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

Berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, Edward III menggunakan 4 variabel diantaranya: a) Komunikasi, b) Sumber Daya, c) Disposisi, dan d) Struktur Birokrasi sebagai variabel yang akan dikaji dan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

a) Komunikasi

Variabel komunikasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi sebuah kebijakan. Variabel ini merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menjawab persoalan implementasi kebijakan. Suatu informasi dapat diketahui oleh para pembuat kebijakan apabila terdapat komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Jika ini terjalin dengan baik, maka implementasi akan efektif terlaksana.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.



Sumber: diolah peneliti (2021)

Gambar 2. Indikator Komunikasi

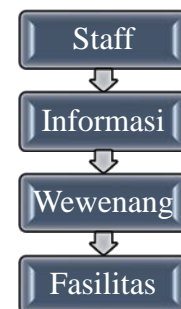
Dalam bagan di atas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan guna mencapai keberhasilan variabel komunikasi, diantaranya:

- 1) Transmisi yaitu adanya perpindahan atau penyaluran komunikasi. Dalam variabel ini, implementasi akan berjalan dengan baik apabila transmisi komunikasi terjadi dengan baik pula. Banyaknya tingkatan birokrasi yang dilalui dalam proses komunikasi menjadi penyebab terjadinya miskomunikasi, sehingga tujuan yang dicapai terhenti begitu saja dipertengahan jalan implementasi di terapkan.
- 2) Kejelasan. Artinya, pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi yang jelas dari pembuat kebijakan. Agar tidak terjadi hal yang membingungkan ataupun ketidakjelasan bagi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

- 3) Konsistensi, yaitu dimana perlu adanya keteguh pendirian komunikasi yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan untuk diterapkan serta dilaksanakan. Dikarenakan, jika sering kali terjadi perubahan perintah pelaksanaan, maka akan memunculkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan syarat penting agar suatu implementasi atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Edward III mengatakan bahwa sumber daya bisa diukur melalui aspek kecukupan yang meliputi keserasian serta kejelasan *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed”*.



Sumber: diolah peneliti (2021)

Gambar 3. Indikator Sumber Daya

Berdasarkan bagan diatas, beberapa indikator yang dapat dilihat sejauh mana sumber daya berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah:

- 1) Staff merupakan aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan dan staff atau pegawai juga merupakan faktor utama terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Ini

disebabkan karena kurangnya staaf atau pegawai yang memadai serta tidak adanya *skills* yang dimiliki para staff atau pegawai dibidangnya. Untuk menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tidak hanya dibutuhkan penambahan jumlah pegawai saja. Namun juga diperlukan pegawai atau staff yang berkompeten (yang memiliki keahlian dan kemampuan) dibidangnya.

2) Informasi memiliki 2 macam bentuk dalam menggerakkan implementasi kebijakan. Dua macam bentuk tersebut adalah:

- a) Informasi yang berkenaan dengan data kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
- b) Informasi yang berkenaan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan.

Dua poin penting tersebut diataslah yang menjadi poin yang sangat penting dalam menggerakkan pengimplementasian kebijakan. Dikarenakan, hanya berdasarkan poin tersebut indikator informasi dapat dilaksanakan dengan baik jika dijalankan dengan baik dan benar.

3) Wewenang. Wewenang ini seharusnya pada kodratnya haruslah bersifat formal. Hal ini dikarenakan agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan perintah secara lebih efektif. Wewenang ini diperlukan agar ketika kebijakan diterapkan, kekuatan imolementator dapat dilegitimasi. Sehingga pengimplementasian kebijakan tidak

dapat digagalkan atau dibatalkan begitu saja. Namun, wewenang yang diberikan ini juga dapat di salah artikan bagi parfa pemegang kekuasaan. Dimana para penguasa atau pelaksana kebijakan dapat menggunakan wewenang ini hanya untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.

4) Fasilitas. Fasilitas ini diartikan sebagai fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini juga meliputi fasilitas pendukung berupa berupa sarana dan prasarana. Fasilitas ini juga merupakan faktor penting dalam pengimplementasian kebijakan. Namun, tanpa fasilitas pendukung, pengimplementasian kebijakan juga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

c) Disposisi (Perilaku)

Perilaku dari pelaksana kebijakan juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Awaeh et al., 2018). Besar kemungkinan implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keputusan awal kebijakan diterapkan, apabila perilaku pelaksana kebijakan cenderung mendukung pengimplementasian kebijakan yang diterapkan. namun sebaliknya, jika perilaku tersebut negatif, besar kemungkinan akan memunculkan konflik dan kendala yang serius.



Sumber: diolah peneliti (2021)

Gambar 4. Indikator Disposisi

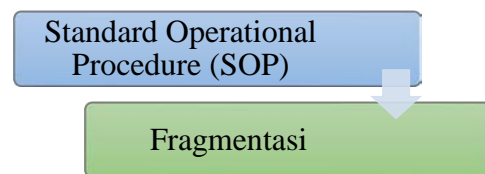
Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan adalah:

- 1) Pengangkatan birokrasi (Pelaksana Kebijakan). Pemilihan serta pengangkatan pelaksana kebijakan ini haruslah orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi dalam mendukung kebijakan yang akan diterapkan, terkhusus kebijakan yang mengutamakan kepentingan warga negaranya. Dikarenakan, jika orang-orang yang termasuk pelaksana kebijakan ini tidak melaksanakan tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Maka, akan menimbulkan hambatan serta kendala yang nyata.
- 2) Insentif ini merupakan faktor pendorong dalam variabel disposisi. Hal ini dikarenakan, menambah keuntungan (reward) bagi para pelaksana kebijakan akan membuat kebijakan yang diimplementasikan berjalan dengan seperti yang diharapkan. Dan pembuat kebijakan Keberadaan birokrasi dalam struktur pemerintah, organisasi, swasta, maupun lainnya sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan, dikarenakan birokrasi akan menjadi pelaksana kegiatan secara keseluruhan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.
- 3) Implementasi kebijakan akan terhambat dan akan memanipulasi insentif untuk mempengaruhi tindakan dari setiap pelaksana kebijakan. Namun, ini berdampak buruk dikarenakan akan menyebabkan dasar

sebagai upaya memenuhi kepentingan dirinya maupun organisasi.

d) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan menjadi tidak efektif apabila struktur birokrasi tidak kondusif terhadap jalannya implementasi kebijakan. Hal tersebut juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan yang seperti diharapkan.



Sumber: diolah peneliti (2021)

Gambar 5. Indikator Struktur Birokrasi

Berdasarkan bagan tersebut, ada 2 faktor yang mempengaruhi variabel struktur birokrasi. Edward III(1980) menjelaskan dalam (Winarno, 2014) bahwa Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi adalah:

- a) Adanya SOP ini sangat diharapkan bagi pembuat kebijakan agar pelaksana kebijakan bisa memanfaatkan waktu yang ada.
- b) Fragmentasi adalah sebaran tanggung jawab yang diberikan kepada unit-unit organisasi yang masih dalam satu lingkup kebijakan. Namun, nyatanya banyak lembaga birokrasi yang menyatakan bahwa justru fragmentasi ini menimbulkan pandangan yang sempit. Hal tersebut menjadi konsekuensi bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang gagal serta tidak terlaksana dengan baik.

Seperti dugaan peneliti yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, Sumber daya adalah dugaan utama peneliti yang menjadi kendala pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mengimplementasikan SIPD. Namun, apakah hanya sumber daya yang menjadi kendala dalam implementasi aplikasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja?. Melalui penelitian ini, berdasarkan teori yang telah peneliti jabarkan, peneliti ingin melihat dan meneliti bagaimana implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja jika dilihat berdasarkan teori Edward III melalui keempat variabel yang telah penulis jabarkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah riset yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2011) penelitian dengan pendekatan deskriptif dan lebih menganalisis merupakan arti dari penelitian kualitatif. Bagi Sugiyono (2011) langkah-langkah dalam riset kualitatif ialah yang didasarkan pada filsafat *postivisme* serta untuk mengetahui keadaan suatu objek murni (alamiah) dan pengambilan sample sumber informasi dicoba secara *purposive* serta *snowball*, metode pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi yang bertabiat kualitatif, serta hasil dari riset ini lebih ditekankan sebuah arti ketimbang generalisasi. Seseorang yang paling memahami situasi yang terjadi dan dijadikan berdasarkan pertimbangan tertentu

adalah teknik sampling berupa *Purposive dan Snowball Sampling* (Sugiyono, 2017). Menurut Chasanah et al. (2017) sah tidaknya suatu data itu berdasarkan melalui teknik triangulasi, berupa data, metode maupun sumber data. Lexy J. Moleong (2018) didalam bukunya juga menyatakan penelitian kualitatif merupakan informasi deksriptif yang dapat dilihat dan dikajidi.. Dalam penelitian ini, peneliti juga melihat studi kasus dalam implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Aneta, 2010). Hal ini dikarenakan, peneliti juga melihat kasus yang terjadi di lokasi penelitian.

Informan penelitian dalam penelitian ini, peneliti memilih Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Program dan Pelaporan, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Bidang Transmigrasi, Kepala Bidang Balai Latihan Kerja, Kasubbag Keuangan serta pegawai di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dipilih secara *Purposive Sampling* sebagai narasumber dalam menyelesaikan penelitian. Narasumber tersebut berperan langsung dalam menggunakan aplikasi SIPD. Peneliti juga memberi batasan dalam penelitian ini. Hal tersebut berguna bagi peneliti agar fokus penelitian ini terbatas. Sehingga, peneliti dapat menganalisa permasalahan yang terjadi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menggunakan aplikasi SIPD. Riset ini memakai teori Implementasi Edward III meliputi komunikasi; sumber daya manusia; disposisi; serta struktur birokrasi.

Teknik utama yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan

wawancara dan juga pendukung lain berupa observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, banyak macam sumber dalam pengumpulan datanya. Analisis informasi ialah langkah terakhir dalam riset saat sebelum melaksanakan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2010). Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data secara keseluruhan dilakukan melalui kompilasi melibatkan validasi, reduksi dan sajian data (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu yang menyatakan jika pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan yang menggunakan teknologi (e-elektronik) ialah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perkembangan pelayanan untuk masyarakat sangat diharapkan sebagai bentuk dorongan dukungan (Perpres No 95, 2018). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sangat bagus di implementasikan. Sistem ini di implementasikan untuk mendorong pelaksanaan informasi yang efektif, inovatif, serta berkualitas dengan menggiatkan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 di setiap pemerintahan kab/kota. Seperti yang penulis telah jabarkan sebelumnya, sangat besar harapan pemerintah bagi setiap SKPD-SKPD di setiap kab/kota dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD ini. Namun, kenyataan yang didapatkan oleh peneliti, banyak kendala yang didapatkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menggunakan aplikasi SIPD. Untuk menjawab semua dugaan awal peneliti yang telah peneliti jabarkan sebelumnya,

peneliti menggunakan teori Edward III untuk menjawab permasalahan implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ada 4 dimensi yang dapat menentukan keberhasilan yang di kemukakan oleh Edward III meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Di Kabupaten Aceh Barat, komunikasi implementasi aplikasi SIPD telah dilakukan sosialisasi dengan memanggil setiap perwakilan instansi khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebanyak lebih kurang 8 pegawai. Sosialisasi ini dilakukan guna memperkenalkan penggunaan aplikasi SIPD dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengadakan rapat evaluasi penggunaan aplikasi SIPD setiap 3 bulan sekali di Pemkab Aceh Barat. Pelaksana SIPD memiliki tugas dalam mengisi, mengumpulkan, dan memvalidasi data yang dimana Bappeda menyiapkan format isian data yang kemudian setelah setiap instansi mengisi format tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bappeda.

Observasi awal peneliti, peneliti menduga bahwa tidak terjadi hambatan pada komunikasi yang terjalin pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Hal ini dikarenakan, komunikasi antara Pemkab Aceh Barat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja sudah terjalin dengan baik. Penggunaan serta pelaksanaan SIPD telah tertuang dalam peraturan-peraturan Pemerintah. Setiap instansi memiliki satu pegawai yang bertanggung jawab penuh dalam menginput data kedalam sistem SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja sudah terjalin dengan baik dalam penggunaan aplikasi SIPD ini. Ini disebabkan, sudah terjalinnya kejelasan tupoksi dari penggunaan aplikasi SIPD ini sendiri di setiap SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Barat, terkhusus pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kejelasan konsistensi komunikasi dari penggunaan SIPD telah berjalan sangat baik. Fenomena ini dilihat oleh peneliti berdasarkan indikator kejelasan konsistensi tupoksi pelaksanaan SIPD dan di perkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber selaku Kepala Bidang Program dan Pelaporan yang menyatakan "... di Kabupaten Aceh Barat sendiri terhadap implementasi SIPD, BPKD melakukan sosialisasi dan memanggil 8 perwakilan dari setiap instansi dinas yang ada di Kabupaten Aceh Barat untuk mengajarkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SIPD"

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja juga menyatakan "... Setiap 3 bulan sekali, kita akan diadakan evaluasi terkait penggunaan dan penginputan di aplikasi SIPD di Pemkab Aceh Barat. Tentu, jika dikatakan bagaimana proses kerja dalam penginputan data kedalam aplikasi SIPD sudah sangat di evaluasi". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa komunikasi antara Pemkab Aceh Barat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sudah terjalin dengan baik sesuai dengan indikator variabel komunikasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan evaluasi selalu dilakukan setiap 3 bulan sekali terkait

aplikasi SIPD di Pemkab Aceh Barat, tentu transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang ada telah terjalin dengan baik dalam penggunaan aplikasi SIPD.

Konsistensi merupakan kejelasan perintah bagi pengguna aplikasi SIPD. Akan tetapi, nyatanya kejelasan komunikasi yang terjalin di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja masih tidak terjalin dengan baik. "... ketika semua proses penginputan dari awal perencanaan hingga penatausahaan keuangan itu penginputannya diserahkan ke bidang teknis masing-masing. Nyatanya, semua penginputan itu diserahkan ke bagian Program dan Pelaporan". (Wawancara, Kabid. Program dan Pelaporan). Tidak adanya kejelasan TUPOKSI bagi pengguna aplikasi SIPD ini, mengakibatkan bidang-bidang teknis yang diserahkan tugas masing-masing dalam penginputan ke sistem SIPD tidak menjalankan tugasnya sesuai arahan yang diperintahkan.

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh pegawai di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja "... Memang semua penginputan dari proses perencanaan hingga penatausahaan keuangan itu di dilakukan dibidang program dan pelaporan". Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang terjalin didalamnya belum ada kejelasan konsistensi penggunaan aplikasi SIPD antara Kepala Dinas dan bidang-bidang teknis yang diserahkan perintah penginputan data ke sistem SIPD terkait kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan munculnya kebingungan bagi para pengguna aplikasi SIPD di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam melaksanakan implementasi aplikasi SIPD ini. Sering terjadi ketidakberhasilan implementasi ini disebabkan dari sumber daya yang ada, baik sumber daya yang tidak memadai maupun yang tidak berkompeten dalam bidangnya (Dione & Faradina, 2020). Di awal, peneliti menduga adanya faktor hambatan dari segi sumber daya yang ada. Dimana, pegawai yang berperan langsung dalam memegang kendali penggunaan aplikasi SIPD mengalami ketidakpahaman dalam menggunakan aplikasi SIPD.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti, justru pada Dinas Transmigrasi menunjukkan bahwa sumber daya yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengisi dan memvalidasi sudah berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya yang ada sudah sangat mendukung dalam pengimplementasian ini, Dimana Kabid. Program dan Pelaporan yang diserahkan oleh atasan dalam memegang kendali untuk menjalankan SIPD sangat terbantu pekerjaannya semenjak implementasi aplikasi SIPD ini dilakukan. Hanya saja, ternyata melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Program dan Pelaporan ditemukan sedikit kendala dalam penggunaan SIPD, dimana Kabid. Program dan Pelaporan mengatakan “Kita dikasih rentang waktu dalam proses penginputan. Seluruhnya *step by step* dilakukan secara online dan saya sendiri merasa belum siap untuk menggunakan aplikasi berbasis web ini walaupun sebenarnya sangat efektif

pelaksanaanya dikarenakan pekerjaan semakin mudah dan cepat”.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga mengungkapkan bahwa dalam implementasi aplikasi SIPD, proses kerja pegawai sangat terbantu. Namun, masih terdapat sedikit kendala dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penginputannya. Hal ini dipertegas melalui wawancara peneliti bersama narasumber selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja “.... pekerjaan kita sangat terbantu dengan implementasi aplikasi SIPD. Akan tetapi, pegawai kita mengeluhkan proses penginputan yang berbasis online ini. Hal ini dikarenakan data yang di input dilakukan secara *step by step*”.

“.... kewenangan dari Kepala Dinas itu buat memvalidasi akhir sama menetapkan operator. Operator itu adalah mereka yang berada di Eselon IV atau maupun staff yang bertugas menginput rangkaian belanja. Sedangkan, program kegiatan hanya di input oleh Bidang Program, begitupun dengan bidang lainnya”. (Wawancara, Kabid. Program dan Pelaporan). Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada sudah memadai dan berkompeten, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala. Apalagi semua proses penginputan yang seharusnya dibagikan disetiap bidang teknis masing-masing, nayatnya hanya dilakukan oleh Kabid. Bidang Program dan Pelaporan saja.

Hasil wawancara tersebut, membenarkan dugaan awal peneliti dimana adanya hambatan dari segi variabel sumber daya. Dimana hal ini juga dipertegas kembali melalui wawancara yang mengatakan “kami hanya diberi sosialisasi

penggunaan aplikasi SIPD. Tapi, tidak dilakukan Diklat Khusus dalam pelaksanaannya”. (Wawancara Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Program dan Pelaporan, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Bidang Transmigrasi, Kepala Bidang Balai Latihan Kerja). Bahkan, Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyatakan “.... sebenarnya, sebaiknya yang melakukan penginputan data ke sistem SIPD diberikan ke anak muda saja yang memiliki potensi dan keahlian dalam menggunakan teknologi. Sehingga, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan yang ada”.

Berdasarkan hasil riset tersebutlah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar adanya kendala yang terjadi berupa sumber daya. Dimana adanya ketidakpahaman penggunaan aplikasi SIPD terhadap pegawai yang memegang kendali dalam penggunaan aplikasi SIPD tersebut. Sehingga, setiap Kabid yang diserahkan tugas dalam penginputan teknis bidangnya masing-masing, hanya menyerahkan semua kendali pada Bidang Program dan Pelaporan saja.

3. Disposisi

Komitmen serta sikap jujur harus dimiliki implementator sebagai wujud karakter yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggungjawab, karena suatu program dapat berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki sikap (Nasution & Nurwani, 2021). Dalam menjalankan suatu tanggung jawab, besar harapan yang diinginkan agar implementator ini melaksanakan tanggung jawab nya dengan sungguh-sungguh. Disposisi dalam implementasi bisa menimbulkan kendala.

Maka dari tu, setiap orang yang berdedikasi dalam kebijakan yang diterapkan serta terkhusus terhadap kepentingan rakyat lah yang harus diangkat dalam pemilihan personil pelaksana kebijakan (Dione & Faradina, 2020).

Observasi awal peneliti ketika berada di lokasi penelitian, peneliti tidak menemukan masalah apapun terhadap variabel disposisi ini. Ini dikarenakan, peneliti melihat perilaku pegawai yang memegang kendali dalam menggunakan aplikasi SIPD sudah benar adanya dan sesuai dengan yang telah di perintahkan.

Hal tersebut ternyata berbeda dengan apa yang telah peneliti peroleh. Dimana, terdapat kesenjangan atau informasi yang berbeda yang peneliti dapatkan terkait pengguna aplikasi SIPD. Dimana, awalnya Kepala Bidang Transmigrasi, Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Kepala Bidang Balai Latihan Kerja menyatakan bahwa “.... semua penginputan data ke sistem SIPD itu dilakukan oleh setiap bidang masing-masing sesuai dengan bagian teknisnya”. Sedangkan Kasubbag Keuangan menyatakan hal yang berbeda “Penginputan data ke SIPD sebenarnya itu seperti yang sudah dijelaskan, semua bidang harus input data masing-masing bidang. Tapi, nyata yang terlihat? Hanya Kabid. Program dan Pelaporan saja yang mengerjakan semua tugas bidang dalam penginputan data ke sistem”

Pelaksana SIPD yang diberi tanggung jawab dalam penggunaan SIPD sebenarnya sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik walaupun tidak sejalan dengan TUPOKSI yang berlaku, yaitu dimana semua proses penginputan yang seharusnya dilakukan oleh setiap bidang

teknis hanya dilaksanakan oleh Bidang Program dan Pelaporan. Penunjukkan pemegang kendali aplikasi SIPD oleh Kepala DISTRAKER sudah sesuai dengan indikator pengangkatan birokrasi, namun pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan tugas dan arahan yang seharusnya. Sangat disayangkan, terkhusus Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak memberikan insentif (*reward*) bagi pengguna aplikasi SIPD ini. Sehingga peneliti melihat bahwa pengguna aplikasi SIPD tetap menjalankan tugasnya sesuai arahan dan perintah yang diberikan.

Berdasarkan riset yang didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel dimensi disposisi yang terjadi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga masih ada kendala, yaitu dimana pengangkatan birokrasi sudah sesuai. Namun, pelaksanaan tugas yang diberikan tidak sejalan dengan TUPOKSI yang berlaku. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa penghargaan (*reward*) adalah hal yang sangat penting yang patut diberikan kepada pengguna aplikasi SIPD dalam menunjang semangat kerja pegawai. Namun demikian, peneliti juga melihat bahwa pegawai yang menjalankan aplikasi SIPD tetap melaksanakan tugasnya, walaupun tidak ada *reward* yang diberikan kepada pengguna aplikasi SIPD.

4. Struktur Birokrasi

Dugaan awal peneliti dari segi variabel struktur birokrasi tidak terjadi kendala sama sekali. Dikarenakan peneliti melihat bahwa struktur birokrasi ini sendiri sudah dijelaskan secara rinci didalam permendagri No 70 Tahun 2019. Hal ini juga dipertegas oleh peneliti berdasarkan

hasil yang peneliti lihat yaitu dari pengumpulan data hingga melaksanakan rapat evaluasi data, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah berpedoman pada Permendagri No 70 Tahun 2019. Dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan alur serta tata cara pelaksanaan SIPD.

Berdasarkan hasil riset dilapangan juga membenarkan dugaan awal peneliti, dimana kenyataan yang terjadi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tidak terjadi kendala apapun dalam struktur birokrasinya. Dikarenakan, didalam Permendagri juga telah dijelaskan tim pelaksana (pengelola) SIPD beserta kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan. Ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait yaitu “.... Untuk struktur birokrasi sendiri kan sudah diamanatkan berdasarkan permendagri. Nah kita hanya tinggal mengikuti aturan itu saja”.

Sebenarnya, struktur birokrasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD ini sangat berpengaruh besar. Maka dari itu, struktur birokrasi sangat erat kaitannya dalam implementasi kebijakan. Hal ini di sebabkan, apabila struktur birokrasi ini tidak jelas, maka kebijakan yang akan diterapkan justru tidak akan berjalan bagaimana semestinya.

Namun nyatanya, selain 4 indikator teori berdasarkan Edward III tersebut, peneliti justru menemukan kendala lain dalam melakukan penelitian ini. Kendala tersebut yaitu berupa waktu. Waktu yang diberikan oleh Pemkab Aceh Barat dalam mengimplementasikan dan memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sangat singkat. Hal ini dipertegas oleh Kepala

Bidang Program dan Pelaporan yang mengatakan “dikasih rentang waktu dalam penginputan hingga valisadi data. Kami merasa belum siap dengan waktu yang diberikan dalam penggunaan aplikasi berbasis web ini, dikarenakan proses keseluruhan nya *step by step* secara online”. Rentang waktu inilah yang juga mengakibatkan adanya kendala dalam implementasi aplikasi SIPD. Peneliti melihat kendala waktu ini berupa sosialisasi yang diberikan oleh BPKD untuk memahami penggunaan aplikasi SIPD sangat singkat, khususnya bagi pemegang kendali aplikasi SIPD yang ada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Hal ini juga di pertegas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber “.... Kami hanya diberi sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi SIPD ini. kami tidak diberikan Diklat Khusus bagaimana cara penggunaan aplikasi SIPD”.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh BPKD masih minim terhadap pemahaman yang didapatkan oleh pelaksana yang bertanggungjawab dalam penggunaan SIPD. dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi SIPD ini, maka pegawai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merasa waktu yang diberikan dalam Penginputan data hingga validasi data masih menjadi kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Permasalahan yang telah peneliti uraikan, peneliti melihat sebaiknya sebagai dukungan agar implementasi aplikasi SIPD ini bisa berjalan secara maksimal, Pemkab Aceh Barat sebaiknya memberikan Diklat

khusus bagi SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Barat, khususnya pegawai yang memegang langsung kendali aplikasi SIPD terkhusus pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Diharapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membuka wadah masukkan apa saja hambatan-beserta kendala yang terjadi dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Agar wadah ini dapat menjadi masukkan bagi pemerintah khususnya Pemkab Aceh Barat dalam melaksanakan Implementasi aplikasi SIPD sesuai dengan keputusan awal yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga, implementasi kebijakan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi Pemkab Aceh Barat sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Bersumber dari hasil riset yang telah peneliti lakukan, terkait fenomena yang terjadi telah penulis jabarkan di ulasan sebelumnya. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala pada dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dalam riset ini adalah: (1) Berdasarkan poin Komunikasi, menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah

Aceh Barat terhadap instansi-instansi telah dilakukan dengan baik, hanya saja komunikasi yang terjalin pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terjalin dengan baik; (2) Sumber Daya yang ada pada Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja menunjukkan bahwa sudah sangat mendukung dalam pengimplementasian ini, walaupun tidak ada kesesuaian Tupoksi yang terjalin dari proses penginputan dari perencanaan hingga penatausahaan keuangan; (3) Hasil riset terkait Disposisi untuk pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja masih terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan; (4) Ternyata dalam implementasi aplikasi SIPD justru ditemukan kendala berupa waktu dalam implementasi aplikasi SIPD. Disebabkan proses pelaksanaan yang dilakukan secara online dan telah diberikan rentang waktu penginputan, serta dalam waktu implementasi kebijakan Pemkab Aceh Barat hanya memberikan sosialisasi dalam penggunaan SIPD, sehingga memunculkan ketidakpahaman bagi pengguna SIPD.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar sebaiknya pemerintah tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi bagi pengguna SIPD. Namun, juga melakukan Diklat Khusus bagi pengguna aplikasi SIPD agar pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memahami jelas bagaimana tata cara penggunaan aplikasi SIPD itu sendiri dengan baik. Dari segi dimensi sumber daya demi untuk mendorong semangat kinerja pegawai khususnya pengguna aplikasi SIPD, Pemkab Aceh Barat maupun khususnya Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja sebaiknya memberikan *Reward* bagi pengguna aplikasi SIPD. Dikarenakan *Reward* ini merupakan hadiah kecil untuk memunculkan semangat kerja, sehingga diharapkan implementasi aplikasi SIPD ini juga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*, 4(1).
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(54–65). <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Awaeh, O., Pioh, N. R., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/19161>
- Azzindani, R., & Irwan, M. (2020). Pengaruh Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Mediasi Good Government Governance. *Jurnal Studi Akutansi Dan Keuangan*, 3((1)), 31–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 12–32. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/921/0>

- Creswell, J. W. (2009). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. LLndon: Sage Publications.
- Permendagri, Pub. L. No. 70 Tahun 2019, 1 (2019).
- Databook, G. M. (2018). *1Q18 Update 2018*. Gartner Research.
- Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*. 21(1), 62–79.
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan sistem Teknologi Informasi*.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Edisi Revi).
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Perpres No 95, (2018).
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81–106. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2), 1–25.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112–133.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.
- Wartini, N. N., & Yasa, L. G. . M. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(5), 1411–1438.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–13.